

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya manusia. Bahkan, Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun hal tersebut tidak menjamin Indonesia akan menjadi negara yang maju dan negara yang terlepas dari berbagai permasalahan terutama dalam permasalahan pendidikan.

Negara yang maju tentu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor penunjang sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan pendidikan. Untuk Indonesia yang maju dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan mengambil peranan besar dan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia berkarakter yang kaya akan ilmu pengetahuan untuk menuju Indonesia sebagai negara maju.

Pendidikan salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (Bashori, 2019), dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi (Abdul Latif, 2006). Dalam pengertian lain, Soyomukti (2015) mengatakan bahwa pendidikan

adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu". Menurut Azyumardi Azra (2010) pendidikan lebih dari sekedar pengajaran.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasar pada undang-undang tersebut, bahwa pendidikan adalah hal penting yang mesti dilaksanakan agar lahir generasi yang berkualitas.

Pendidikan akan selalu menjadi bagian penting dalam setiap hal, karena sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan adalah elemen utama yang akan mendorong dan menjamin berbagai hal. Maka dari itu semua orang wajib mendapatkan hak pendidikannya sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", Ayat 2 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya.

Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui.

Dalam Undang-undang Pendidikan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 disebutkan, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tantangan yang makin besar di masa akan datang hanya dapat diatasi dengan terus menerus membangun sistem pendidikan dan kebudayaan nasional secara berkelanjutan. Karena itu, sistem Pendidikan Nasional dan Kebudayaan harus terus dibina dan dikembangkan, sehingga mampu meningkatkan keunggulan bangsa di tengah-tengah persaingan yang terus bertambah ketat.

Pendidikan selain berkualitas juga harus merata. Semua orang berhak mendapatkan hak kependidikannya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Pemerataan pendidikan harus benar-benar dijalankan dengan semestinya dengan harapan untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia serta mewujudkan keadilan pendidikan di negara ini.

Untuk mendukung pemerataan pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan mempunyai aturan yang dituangkan dalam PERDA Provinsi Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah. Adapun pendidikan menengah yang dimaksud dalam peraturan pemerintah adalah jenjang pendidikan dengan jalur formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Makassar tercatat cukup signifikan. Terdapat 134 SMA yang tersebar di berbagai wilayah di Makassar. Selain itu, terdapat 61 SMK yang menawarkan berbagai program kejuruan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, jumlah MAN di Kota ini adalah 7, yang menyediakan pendidikan dengan kurikulum berbasis agama Islam untuk jenjang menengah atas (BPS Sulsel)

Sebagai salah satu Kota Metropolitan, Makassar termasuk ke dalam kota yang memiliki permasalahan dalam tingkat pendidikan masyarakatnya. Data mengenai anak putus sekolah di Makassar menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Pada tahun 2022, jumlah anak yang putus sekolah Tingkat SMA/SMK sederajat di Makassar dilaporkan mencapai sekitar 252 anak (Kemendikbudristek)

Selain itu, di Kota Makassar, angka putus sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menjadi perhatian yang

signifikan. Berdasarkan data dari beberapa sumber, angka putus sekolah di tingkat SMA di Makassar telah mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka putus sekolah di Makassar pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, angka putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Makassar masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang tersedia, angka putus sekolah untuk jenjang SMA di Makassar mencatat sejumlah 268 siswa. Salah satu laporan menyebutkan bahwa angka putus sekolah di tingkat SMA di Indonesia pada tahun ajaran 2022/2023 mencapai 1,38%, yang juga mencerminkan situasi di banyak Kota termasuk Makassar (Kemendikbudristek) (BPS).

Di Makassar, masalah pemerataan dan pendidikan bermutu memang seringkali menjadi sorotan. Pemerataan pendidikan mengacu pada upaya memastikan akses yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka. Di kota besar seperti Makassar, tantangan ini bisa jadi lebih kompleks karena adanya perbedaan dalam fasilitas dan kualitas pendidikan yang tersedia.

Berdasarkan data dan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan pemerataan pendidikan di Makassar meliputi:

- Akses terhadap Pendidikan: Tidak semua anak di Makassar memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dasar dan menengah. Faktor geografis, seperti jarak yang jauh dari sekolah, serta kondisi ekonomi keluarga sering menjadi penghalang utama.
- Tingkat Partisipasi Sekolah: Tingkat partisipasi sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah, masih rendah di beberapa bagian Makassar. Banyak anak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
- Rasio Guru-Murid yang Tidak Seimbang: Banyak sekolah di Makassar yang menghadapi masalah rasio guru-murid yang tidak seimbang, terutama di sekolah-sekolah negeri yang lebih padat. Hal ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi guru dan kurang optimalnya perhatian yang dapat diberikan kepada setiap siswa.
- Kualitas Infrastruktur Sekolah: Masalah infrastruktur sekolah, seperti bangunan yang tidak memadai, kurangnya ruang kelas, dan fasilitas sanitasi yang buruk, masih menjadi tantangan besar. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan kenyamanan siswa.
- Faktor Ekonomi dan Sosial: Latar belakang ekonomi dan sosial keluarga sangat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak di Makassar. Anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan terhadap putus sekolah dan kurangnya dukungan pendidikan di rumah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah pada pasal 2 dijelaskan bahwa wajib belajar pendidikan menengah dimaksudkan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan serta mewujudkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mencari cara untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Makassar.

Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai program, termasuk hibridisasi metode pembelajaran dan inisiatif lain untuk memastikan anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan (BPS). Upaya untuk mengatasi masalah ini termasuk pemberian bantuan finansial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta intervensi langsung di sekolah-sekolah untuk membantu siswa yang berisiko tinggi putus sekolah. Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menurunkan angka putus sekolah dan memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak di Makassar (Data Indonesia).

Masalah putus sekolah di Kota Makassar masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Untuk melihat sejauh mana kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Menengah berjalan, ada tiga indikator penting yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi, yaitu tingkat pencapaian pendidikan, jumlah peserta pendidikan, dan hasil belajar peserta didik.

Ketiga indikator ini juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah. Jika banyak siswa tidak mampu menyelesaikan sekolah menengah, tentu ini menunjukkan rendahnya pencapaian kebijakan. Begitu juga ketika jumlah peserta terus menurun, atau hasil belajar siswa tidak memuaskan, maka hal tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa kebijakan belum berjalan efektif. Dengan memahami kondisi ini, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi program secara menyeluruh dan mencari solusi untuk menekan angka putus sekolah di Kota Makassar.

Kondisi ideal yang diharapkan dari penerapan peraturan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang wajib belajar pendidikan Menengah adalah menciptakan kesadaran pendidikan bagi anak, orang tua, lingkungan, masyarakat serta pemerintah sehingga komunikasi antara semua pihak menjadi kunci emas keberhasilan dari kebijakan ini. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul “***Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Menengah Di Kota Makassar***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Menengah di Kota Makassar?

1.2.2 Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada uraian latar belakang dan rumusan masalah, Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Menengah di Kota Makassar.

1.3.2 Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk memberi informasi kepada para masyarakat dan mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu pemerintahan terkait kebijakan wajib belajar pendidikan menengah Kota Makassar.

1.4.2 Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan dalam mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi peneliti atau melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan wajib belajar pendidikan menengah Kota Makassar.

1.4.3 Manfaat Praktis

1.4.3.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait peranan pemerintah Kota Makassar terhadap permasalahan anak-anak putus sekolah.

1.4.3.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan kepada semua orang demi sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan.

1.4.3.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah Kota Makassar untuk berperan lebih aktif dalam penanganan masalah anak-anak putus sekolah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Definisi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Ada beberapa peneliti yang mengungkapkan pendapat mereka mengenai kebijakan, atau yang bias akita kenal dalam istilah Bahasa Inggris sebagai *policy*.

Menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin Priatna (Amin Priatna, 2008) bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan manajer. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program, aktivitas, dan tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku

(stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016); (Bashori, 2016).

Eystone dalam Wahab (2012) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan yang terjadi antara suatu entitas atau pemerintahan dengan lingkungannya. Definisi yang sama telah diberikan oleh Wilson (2006), yang menggambarkan kebijakan publik sebagai tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu, tindakan yang telah atau belum dilakukan pemerintah untuk menyelesaikannya, dan penjelasan tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Menurut Leimendone (2000:49), kebijakan publik adalah kebijakan yang tertata, teratur, sesuai, konsisten, dan termekanisme menurut runtutan keberpihakan dalam berbagai implementasi yang strategis bagi pembangunan suatu bangsa. Pada akhirnya, model kebijakan publik membentuk proses perencanaan, pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2014) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kegiatan atau tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah yang mencakup elemen keputusan, yaitu upaya untuk memilih antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

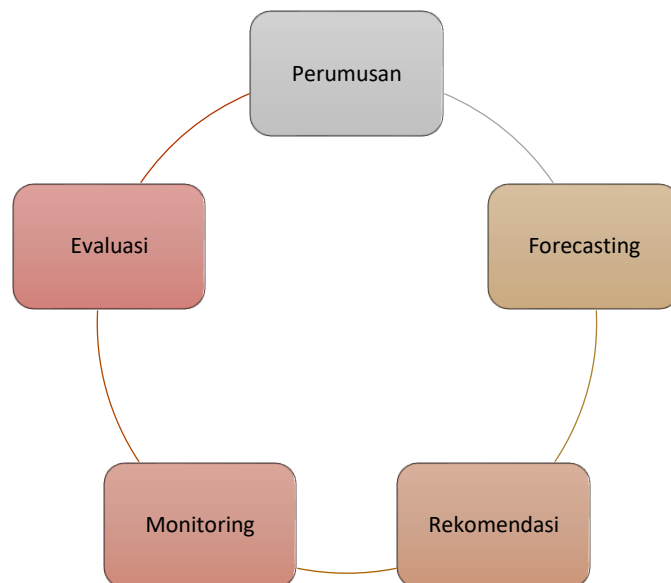
2.1.2. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010), faktor-faktor berikut akan menentukan kerangka kebijakan publik:

- a. Tujuan yang akan dicapai, yang mencakup kompleksitasnya. Kinerja kebijakan semakin sulit dicapai ketika tujuan kebijakan semakin kompleks. Sebaliknya, ketika tujuan kebijakan semakin sederhana, mencapainya juga semakin mudah.
- b. Seperti apa konsep nilai yang harus dipertimbangkan? Kebijakan yang berfokus pada satu nilai akan lebih mudah dicapai daripada kebijakan yang memiliki banyak variasi nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan: Sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya akan menentukan kinerja kebijakan.
- d. Kemampuan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan akan memengaruhi kualitas kebijakan itu sendiri. Tingkat pendidikannya,

- kemampuan dalam bidang tersebut, pengalaman kerjanya, dan integritas moralnya menentukan kualitas tersebut.
- e. Dunia di mana kebijakan diterapkan memengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan lainnya.
 - f. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan untuk menerapkan suatu kebijakan akan berdampak pada kinerja kebijakan tersebut. Seseorang dapat menggunakan pendekatan top-down atau bottom-up, otoriter atau demokratis.

2.1.3. Siklus Kebijakan Publik



Gambar 1. Siklus Kebijakan Public

- a. Perumusan Masalah: Memberikan informasi tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan masalah.
- b. Forecasting (Peramalan): Memberikan informasi tentang konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila kebijakan tidak dibuat.

- c. Rekomendasi kebijakan: memberikan informasi tentang manfaat bersih dari setiap opsi kebijakan, dan merekomendasikan opsi kebijakan dengan manfaat bersih tertinggi.
- d. Monitoring kebijakan: memberikan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari penerapan kebijakan, termasuk kendalanya.
- e. Evaluasi kebijakan: memberikan informasi tentang kinerja.

2.1.4. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011), kinerja implementasi dipengaruhi oleh lima faktor. Mereka adalah sarana dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi dan penguatan aktivitas antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2008), tiga komponen penting mempengaruhi proses komunikasi yaitu:

- a. Faktor pertama adalah transmisi. Sebelum pejabat melaksanakan keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah di buat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua adalah kejelasan. Petunjuk pelaksanaan kebijakan harus diterima dan dikomunikasikan dengan jelas jika kebijakan ingin diterapkan dengan benar. Seringkali,

arahan yang diberikan kepada pelaksana tidak jelas dan tidak menunjukkan kapan program dilaksanakan.

- c. Faktor ketiga adalah konsistensi; perintah pelaksana harus konsisten dan jelas jika implementasi kebijakan ingin berhasil. Walaupun arahan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan jelas, namun jika arahan tersebut bertentangan, ia tidak akan dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Memindahkan keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian tertentu adalah masalah yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan, menurut William (dalam Nawawi, 2007). Selain itu, metode ini memastikan bahwa tindakan yang dilakukan serupa dengan keputusan dan berfungsi dengan baik dalam lingkup lembaga. Hal ini mengandung pesan yang jelas jika dibandingkan dengan kesulitan membedakan antara keputusan kebijakan dan kegiatan yang dapat dilakukan.

Proses implementasi dan perspektif hasil juga menentukan keberhasilan kegiatan atau kebijakan. Dari perspektif proses, kebijakan pemerintah dianggap berhasil jika dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, yaitu pelaksana, agen pelaksana kelompok sasaran, dan keuntungan kebijakan.

2.2. Kebijakan Wajib Belajar

2.2.1. Latar Belakang Wajib Belajar

Di akhir Pelita (Pembangunan Lima Tahun) III, program wajib belajar dimulai pada 2 Mei 1984. Saat meresmikannya, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar. Program ini mewajibkan semua anak berusia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar selama 6 tahun (SD). Program ini tidak seperti kebijakan wajib belajar yang memaksa orang untuk belajar dan memberlakukan sanksi jika mereka tidak melakukannya. Pemerintah hanya meminta orang tua untuk memasukkan anak-anak mereka yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan, termasuk tenaga pengajar dan gedung sekolah dan peralatan. Pemerintah waktu itu berusaha mengatasi program wajib belajar dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program Gerakan Nasional-Orang Tua Asuh (GNOTA) adalah hasilnya. Untuk meningkatkan pelaksanaan GN-OTA, Surat Keputusan Bersama antara Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88/1996, Nomor 0129/U/1996, dan Nomor 195/1996 diterbitkan. Surat Keputusan ini membahas bantuan kepada anak-anak yang kurang mendapat manfaat, anak-anak yang cacat, dan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.

Angka partisipasi Sekolah Dasar (SD) naik sebesar 1,4 persen, menandakan keberhasilan program wajib belajar 6 tahun. Di akhir Pelita IV, angka partisipasi SD naik menjadi 89,91%. Peningkatan ini meningkatkan niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak yang mulai masuk program wajib belajar selanjutnya menjadi usia 7-15 tahun atau sampai tingkat SMP. Sepuluh tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak-anak Indonesia harus belajar hingga SMP. Pada 2 Mei 1994, Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dimulai. Inpres Nomor 1 Tahun 1994 memperkuat kebijakan ini.

Program wajib belajar pemerintah memberikan kesempatan yang bagus untuk meningkatkan kualitas diri, terutama bagi masyarakat miskin karena program ini dimaksudkan untuk membantu mereka. Ini adalah tanggung jawab dan kepedulian pemerintah, dan kita seharusnya memanfaatkannya. Winarti (2003:159-163) menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan kemampuan berupa jenjang pendidikan, keterampilan kerja dan penguasaan teknologi yang dimiliki.

Pelaksanaan wajib belajar menurut Vassiliou (2011, p. 9) *"In most countries, the start of compulsory education coincides with the start of primary education. Almost everywhere, children who have*

reached compulsory school age must be enrolled in an education institution". Artinya, sebagian negara menetapkan pendidikan wajib dimulai dengan pendidikan dasar. Hampir disetiap negara, anak-anak yang telah mencapai usia wajib belajar harus terdaftar di institusi pendidikan formal, nonformal, atau informal dengan kata lain bagi anak-anak usia wajib belajar harus bersekolah.

2.2.2. Faktor Pendukung Kebijakan Wajib Belajar

Menurut Yenny (2017), beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun termasuk kecukupan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan pembiayaan pendidikan.

- a. Kecukupan tenaga pendidik: Menurut Standar Nasional Pendidikan, pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial adalah kompetensi sebagai pendidik di sekolah dasar dan menengah.
- b. Setiap satuan pendidikan Wajib harus memiliki fasilitas yang mencakup lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang

pendidik, ruang tata usaha, perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang untuk bahan habis pakai dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- c. Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara menawarkan layanan pendidikan gratis kepada anak-anak di bawah umur.

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses yang menggunakan pendapatan dan sumber daya tersedia untuk menjalankan sekolah. Sistem ini bervariasi tergantung pada kondisi yang berbeda di setiap wilayah, termasuk lokasi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah, dan administrasi sekolah. Biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya individu. Biaya investasi untuk satuan pendidikan mencakup pembiayaan sarana dan prasarana,

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi mencakup gaji guru dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat pada gaji mereka.

2.2.3. Tujuan Wajib belajar

Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mewajibkan pendidikan selama dua belas tahun, yang berlaku dari tahun ajaran 2013/2014. Undang-undang tersebut dibuat karena tugas pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, untuk membantu anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang lebih baik. Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan undang-undang ini adalah untuk Anak-anak di Indonesia menerima pendidikan yang layak, seperti yang ditunjukkan oleh peraturan saat ini yang mewajibkan anak-anak Indonesia mengikuti pendidikan selama 12 tahun atau hingga mereka lulus dari sekolah menengah atas sekolah menengah atas (SLTA/SMA) sederajat.

Ini adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak Indonesia, yang merupakan penerus bangsa. Karena generasi muda yang penuh nasionalisme akan menentukan kemajuan dan kemajuan Indonesia. Generasi muda ini akan membuat negara kita yang dicintai ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Selain itu, dengan adanya program pendidikan ini, pemerintah berharap anak-anak bangsa tidak akan ketinggalan dalam kemajuan

informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi (IPTEK) dan kemajuan seiring dengan kemajuan zaman.

2.2.4. Manfaat Wajib Belajar

Program wajib belajar selama dua belas tahun sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini. Dengan program wajib belajar 12 tahun ini, pemerintah dapat mengurangi tingkat putus sekolah dan memajukan teknologi pendidikan dengan perkembangan yang canggih sehingga siswa Indonesia dapat bersaing di masa depan.

- a. Salah satu manfaat utama dari pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan warga negara. Diharapkan bahwa pendidikan, terutama wajib belajar 12 tahun yang dimulai dari tingkat SD hingga SLTA, akan menghasilkan warga negara yang cerdas dan dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Hal ini juga dapat membantu masyarakat Indonesia menghindari ketinggalan zaman dibandingkan dengan negara lain.
- b. Pengetahuan adalah salah satu gerbang ilmu yang dapat bermanfaat bagi setiap orang di negara ini. Undang-undang wajib belajar akan memungkinkan semua orang di negara ini memperoleh pengetahuan yang mereka butuhkan. Ini diberikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- c. Pendidikan adalah dasar untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tidak hanya sekolah dasar, SMP, dan SMA, tetapi juga

ada gelar sarjana, magister, dan doktor. Tanpa pendidikan dasar ini, kita tidak akan bisa mencapai semua gelar ini.

- d. Sebagai modal untuk melamar pekerjaan: Saat ini, banyak perusahaan membutuhkan ijazah sebagai syarat utama untuk melamar pekerjaan. Orang yang memiliki ijazah akan lebih mudah melamar pekerjaan.
- e. Salah satu tujuan dari undang-undang wajib belajar adalah untuk memastikan bahwa semua anak di negara ini memiliki akses ke pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu mencegah terjadinya kondisi di mana orang tidak pernah mendapatkan pendidikan sama sekali, yang pasti akan berdampak buruk pada kemajuan negara.
- f. Agar menarik minat anak-anak pada pendidikan Program undang-undang wajib belajar ini juga membantu menarik minat anak-anak pada pendidikan. Ini dapat memberi mereka pemahaman penting tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan dasar.
- g. Mencegah tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak: Keuntungan dari undang-undang wajib belajar juga dapat membantu mencegah tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Jumlah jam belajar yang tinggi mencegah anak-anak melakukan kejahatan. Yang kedua adalah karena

pendidikan di sekolah mengajarkan etika dan moral, yang membantu mencegah kriminalitas.

- h. Untuk memajukan sistem pendidikan Indonesia, sistem pendidikan harus terus berkembang dan maju setiap waktu. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan pada kurikulum yang mengatur sistem pendidikan. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan dan memajukan sistem pendidikan Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi.
- i. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, undang-undang wajib belajar memiliki potensi untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional, terutama pendidikan dasar dan menengah.
- j. Salah satu manfaat utama dari undang-undang wajib belajar adalah bahwa itu akan membantu sistem pendidikan dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berprestasi, bermoral, dan berintegritas tinggi, yang akan memajukan kehidupan bernegara dan berbangsa di masa depan.

2.2.5. Masalah Pemerataan dan Pendidikan Bermutu di Indonesia

Masalah pemerataan dan mutu pendidikan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Berikut adalah beberapa masalah utama beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya:

a. Masalah Pemerataan Pendidikan

1) Ketimpangan Regional

- Kesenjangan Antara Kota dan Desa: Banyak sekolah di daerah pedesaan tidak memiliki fasilitas yang memadai dibandingkan dengan sekolah di perkotaan. Ini termasuk kurangnya akses ke internet, buku, laboratorium, dan guru berkualitas .
- Akses terhadap pendidikan Menengah dan Tinggi: Di banyak daerah terpencil, akses ke pendidikan menengah dan tinggi sangat terbatas, baik karena jarak, infrastruktur transportasi yang buruk, maupun kurangnya institusi pendidikan .

2) Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur

Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih memiliki fasilitas yang sangat minim. Hal ini mencakup bangunan sekolah yang rusak, kurangnya ruang kelas, serta ketiadaan fasilitas dasar seperti toilet dan air bersih .

3) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus berhenti sekolah untuk bekerja membantu ekonomi keluarga. Program beasiswa dan bantuan keuangan belum sepenuhnya menjangkau semua yang membutuhkan .

b. Masalah Pendidikan Bermutu

a Kualitas Pengajaran dan Guru

- Banyak guru di Indonesia belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Pelatihan berkelanjutan dan

pengembangan profesional sering kali tidak merata dan kurang efektif, terutama di daerah-daerah terpencil (DISKOMINFO).

- Beban administratif yang tinggi dan rendahnya gaji guru juga mengurangi motivasi dan efektivitas pengajaran (DISKOMINFO).

b Kurikulum yang Kurang Relevan

Kurikulum sering kali dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan sosial .

c Teknologi Pendidikan

Akses terhadap teknologi pendidikan masih sangat terbatas di banyak daerah. Pandemi COVID-19 memperlihatkan kesenjangan digital yang signifikan, dengan banyak siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat atau internet untuk mengikuti pembelajaran daring.

2.2.6. Gambaran Umum Pendidikan Sekolah Menengah di Kota Makassar

Gambaran tentang kondisi pendidikan di Kota Makassar dipaparkan dalam dua kategori yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai faktor strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan. Lingkungan

internal merupakan faktor lingkungan yang langsung berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi akan tetapi di luar kondisi organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Gambaran pendidikan di Kota Makassar diuraikan berdasarkan jenjang pendidikan formal sekolah menengah yakni Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta Sekolah Menengah Kejuruan.

- a. Lingkungan Internal Keberhasilan pembangunan Kota Makassar dalam bidang pendidikan pada tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif rendah dimana dari parameter pendidikan pada skala nasional nampaknya masih jauh tertinggal di banding kota lain di Indonesia. Diukur dari indicator kependudukan strategis sector pendidikan masih menempati peringkat ke 50 dari 60 kota di Indonesia sekalipun pada bidang tertentu beberapa pelajar telah mampu mencapai peringkat nasional hingga internasional seperti menjuarai Olimpiade mata pelajaran matematika dan fisika.
- b. Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (sederajat). Pada tahun 2005 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA sebesar 74,38% dengan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 54,32% sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

sebesar 78,41%. Tingkat siswa SMA mengulang berkisar 0,66% dengan jumlah lulusan SMA sebanyak 15.632 orang.

Pada Tahun 2025 tercatat ada 135 SMA yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dimana terdiri dari 24 (17,78%) SMA milik pemerintah (Negeri) dan 111 (82,22%) milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 53 (39,26%) SMA di Kota Makassar sudah terakreditasi A, 46 (34,07%) SMA terakreditasi B, 27 (20,00%) SMA terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (6,67%).

Untuk SMK tercatat ada 81 SMK yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dimana terdiri dari 13 (16,05%) SMK milik pemerintah (Negeri) dan 68 (83,95%) milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 27 (33,33%) SMK di Kota Makassar sudah terakreditasi A, 32 (39,51%) SMK terakreditasi B, 18 (22,22%) SMK terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (4,94%).

Jumlah siswa SMA sebanyak 36.549 orang sedangkan siswa SMK sebanyak 19.985 orang. Jumlah ruang kelas sebanyak 1.409 unit dengan kondisi 97,44 % baik, 5,11% rusak ringan, dan 1,14% rusak berat.

Jumlah SMA/SMK yang memiliki fasilitas perpustakaan guna mendukung program Pemerintah Kota Makassar sebanyak 129 unit atau 69,73%, fasilitas laboratorium sebanyak 126 unit dan 10 unit bengkel kerja siswa SMK atau

12,35%, fasilitas lapangan olah raga sebanyak 65 unit dan UKS sebanyak 44 unit.

Kegiatan pembelajaran ditangani oleh guru SMA sebanyak 2.728 orang, terdiri atas guru SMA PNS sebanyak 1.427 orang dan guru SMA non PNS sebanyak 1.301 orang guru SMK sebanyak 1.970 orang, terdiri atas guru SMK PNS sebanyak 701 orang dan guru SMK non PNS sebanyak 1.267 orang.

- c. Lingkungan Eksternal Potensi jasa dan kemitraan dunia usaha merupakan peluang besar yang belum termanfaatkan secara optimal dalam pegnelolaan pendidikan di Kota Makassar. Kehadiran sejumlah perusahaan jasa telekomunikasi yang membentuk student community telah menjadikan subyek pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai pasar aktif dan produktif namun impact yang diberikan belum menyentuh pada strategi dasar pembangunan pendidikan yaitu pemerataan mendapatkan kesempatan pendidikan.

Disisi lain, kehadiran bimbingan belajar telah menjadikan pelajar SD, SMP dan SMA sebagai pasar aktif guna meningkatkan pendapat lembaga namun keterikatan dan kontribusi langsung kepada Dinas Pendidikan belum sepenuhnya dibangun sehingga kehadiran lembaga

bimbingan belajar dan Dinas Pendidikan masih berjalan antagonis.

Sejumlah pusat pembelanjaan pun telah bertumbuh yang pada akhirnya akan menyerap sejumlah tenaga kerja lulusan SMA di Makassar sehingga peluang ini perlu dilirik dengan menyiapkan kurikulum yang bersesuaian dengan kebutuhan pasar tersebut dengan terlebih dahulu membangun kemitraan yang diwujudkan dalam MoU antara Dinas Pendidikan dengan Dunia Usaha.

Potensi jaringan dan akses komunikasi di Kota Makassar tak dapat dipungkiri sangat membangu upaya mendapatkan informasi bagi guru dan siswa olehnya itu perlu sistem pendataan kependidikan dan proses pembelajaran yang berbasis teknologi informasi yang dapat menjembatani kesenjangan guru yang belum mengikuti pelatihan dengan yang sudah mengikuti pelatihan.

Mencapai upaya ini maka pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis Internet atau Visat merupakan terobosan yang tepat dengan tidak lagi berbasis pada sekolah tertentu tetapi menyeluruh pada seluruh sekolah di Kota Makassar. Upaya ini pada akhirnya dapat menjadi alternatif pelatihan jarak jauh bagi guru di Kota Makassar dengan penggunaan internet di sekolah atau rumah masing-masing.

2.2.7. Masalah Pemerataan Pendidikan di Makassar

Pemerataan pendidikan di Kota Makassar menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat akses setara terhadap pendidikan berkualitas bagi semua anak. Berikut beberapa masalah utama yang mempengaruhi pemerataan pendidikan di kota ini:

a. Kesenjangan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama ketidakmerataan pendidikan. Banyak anak dari keluarga berpenghasilan rendah tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan finansial. Biaya tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi juga menjadi beban bagi keluarga kurang mampu, meskipun sekolah negeri tidak memungut biaya pendidikan dasar.

b. Akses ke Fasilitas Pendidikan

Distribusi fasilitas pendidikan yang tidak merata menjadi tantangan besar. Sekolah-sekolah di daerah pusat kota umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pinggiran atau daerah terpencil. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah Makassar.

c. Kualitas Pengajaran

Kualitas guru dan metode pengajaran juga bervariasi. Sekolah-sekolah di daerah yang lebih maju sering kali memiliki akses lebih baik terhadap pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Sebaliknya, sekolah di

daerah yang kurang berkembang mungkin kekurangan guru berkualitas dan jarang mendapatkan pelatihan yang memadai.

d. Infrastruktur yang Tidak Memadai

Beberapa sekolah masih menghadapi masalah infrastruktur, seperti bangunan yang rusak atau tidak layak pakai, kurangnya ruang kelas, dan fasilitas penunjang yang minim. Kondisi ini menghambat proses belajar mengajar dan membuat lingkungan belajar kurang kondusif.

e. Tingginya Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah di Makassar masih cukup tinggi, terutama di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan keluarga sering menjadi alasan utama mengapa banyak siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Ini mencerminkan masalah pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua anak.

f. Kurangnya Dukungan Keluarga

Kurangnya dukungan dari keluarga, baik dalam bentuk motivasi maupun bantuan belajar di rumah, juga berkontribusi pada ketidakmerataan pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang tidak mendukung pendidikan cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah dan lebih berisiko putus sekolah.

g. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memperburuk ketidakmerataan pendidikan. Pembelajaran daring yang diberlakukan selama pandemi sulit diakses oleh siswa yang tidak memiliki perangkat teknologi atau koneksi internet yang memadai. Ini menyebabkan kesenjangan dalam proses belajar dan pencapaian akademik antara siswa yang memiliki akses dan yang tidak.

2.2.8. Masalah Pendidikan Bermutu di Makassar

Kualitas pendidikan di Kota Makassar menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi upaya untuk menyediakan pendidikan bermutu. Beberapa masalah utama yang terkait dengan pendidikan bermutu di Makassar meliputi:

a. Kualitas Guru dan Pengembangan Profesional

Salah satu masalah utama adalah kualitas pengajaran yang bervariasi. Banyak guru di Makassar, terutama di daerah-daerah terpencil, belum mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai. Hal ini mengakibatkan kurangnya penerapan metode pengajaran yang efektif dan inovatif.

b. Fasilitas dan Infrastruktur Sekolah

Masalah lain yang signifikan adalah kondisi infrastruktur sekolah yang belum memadai. Banyak sekolah di Makassar masih kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak. Kondisi ini

menghambat proses belajar mengajar dan membuat lingkungan belajar tidak kondusif bagi siswa.

c. Akses ke Teknologi dan Sumber Daya Digital

Akses terbatas ke teknologi dan sumber daya digital juga menjadi hambatan dalam penyediaan pendidikan bermutu. Banyak sekolah di daerah pinggiran atau terpencil belum memiliki akses yang memadai ke internet dan perangkat teknologi, yang sangat penting untuk mendukung pembelajaran modern dan e-learning.

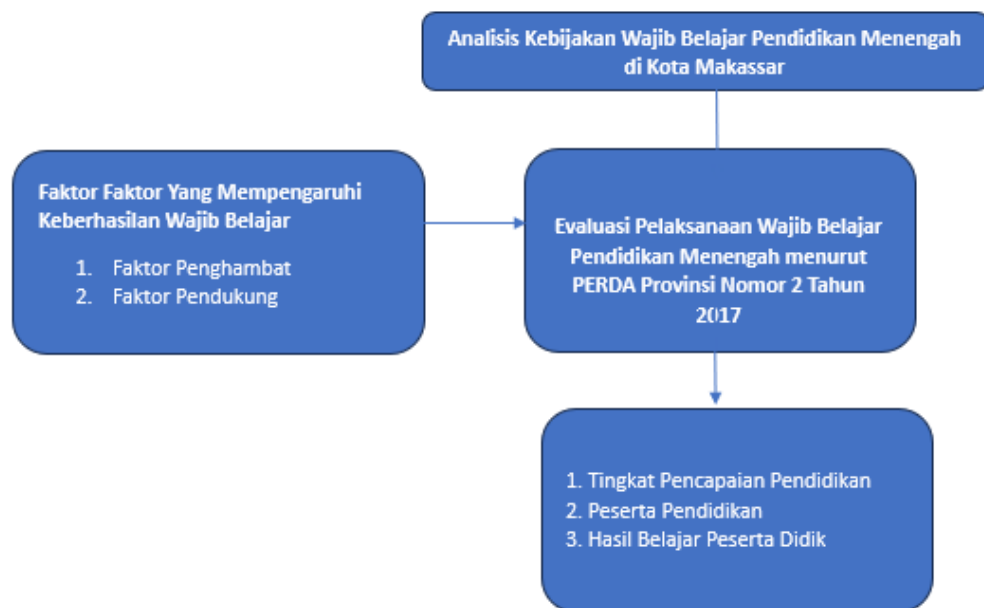
d. Angka Putus Sekolah yang Tinggi

Tingginya angka putus sekolah, terutama di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), menunjukkan adanya masalah dalam menjaga kontinuitas pendidikan. Faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan keluarga sering menjadi alasan utama siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan.

e. Kurangnya Partisipasi Orang Tua dan Komunitas

Partisipasi dan dukungan dari orang tua dan komunitas sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di Makassar, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka sering kali menjadi penghambat. Orang tua yang tidak mendukung atau tidak terlibat dalam proses

pendidikan anak mereka cenderung memiliki anak dengan



prestasi akademik yang lebih rendah.

f. Pendanaan yang Terbatas

Pendanaan yang terbatas untuk sektor pendidikan juga menjadi kendala. Banyak program peningkatan mutu pendidikan yang tidak dapat berjalan optimal karena keterbatasan anggaran. Hal ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan gaji guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan menyediakan sumber daya pendidikan yang berkualitas.

2.2.9. Kerangka Konsep

Pendidikan menengah merupakan tahap penting dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan wajib belajar pendidikan menengah bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses

pendidikan yang layak hingga jenjang SMA atau sederajat. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian pendidikan, peserta didik, dan hasil belajar peserta didik di Kota Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, penghambat, dan pendukung kebijakan ini.